

ANALISIS FUNGSIONALISME STRUKTURAL UNTUK MELIHAT OPTIMALITAS PELAKSANAAN GERBANG SALAM DI PAMEKASAN

Ibnu Ali

(Universitas Islam Madura/ibnualialfarabi@gmail.com)

Ali Tohir

(Universitas Islam Madura/alitohir33@gmail.com)

Abstrak:

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apa kendala-kendala yang menyebabkan pelaksanaan Gerbang Salam belum optimal serta bagaimana rumusan untuk optimalisasi gerakan ini. Penelitian ini lebih difokuskan pada teori fungsionalisme dalam perspektif Talcot Persoon dan Robert K. Merton. Dari Parson akan diambil teori AGIL (*adaftation, goal attainment, integration, dan laten*). Dan dari Robert K. Merton akan diambil pemikiran berupa fungsi, disfungsi, fungsi manifest dan fungsi laten.

Melalui analisis AGIL diketahui bahwa sistem sosial yang dibangun berdasarkan pada nilai-nilai keislaman mengalami kehilangan keseimbangan. Hal itu dikarenakan bagaian-bagian tersebut sudah mengalami disfungsi, terutama pada fungsi *goal attainment* dan *integration*. Sehingga pelaksanaan gerbang salam tidak berjalan optimal.

Kata Kunci:

Fungsionalisme Struktural, Optimalitas Pelaksanaan Gerbang Salam

Abstract:

This research is aimed to find out the obstacles that cause the implementation of Gerbang Salam is not optimal and how to make a formulation for optimizing this movement. This research is focused more on the theory of functionalism in the perspective of Talcott Person and Robert K. Merton. From Parson will be taken the theory of AGIL (adaptation, goal attainment,

integration, and latent). And from Robert K. Merton will be taken theory of a thought of functions, dysfunctions, manifest functions and latent functions. Through AGIL analysis is known that the social system built on Islamic values has lost its balance. That is because these parts have experienced the dysfunctions, especially in the function of goal attainment and integration. So that the implementation of Gerbang Salam does not work optimally.

Keywords:

Structural Functionalism, Implementation Optimality Gerbang Salam

Pendahuluan

Pasca reformasi, pemerintah Republik Indonesia menggulirkan otonomi daerah. Banyak daerah-daerah yang kemudian mencetuskan kebijakan dan kewenangan sendiri untuk mengatur daerahnya selama masih sesuai dengan arah pembangunan nasional. Salah satunya ialah Perda-Perda syari'ah yang bermunculan di banyak daerah, seperti di Aceh, Banten, Makasar, bahkan kabupaten Pamekasan.

Pamekasan menelurkan konsep peningkatan kehidupan beragama yang disebut *Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam)*, sebuah peta konsep dan implementasi *syari'ah* dan nilai-nilai Keislaman di Pamekasan. Konsep dan implementasi gerakan ini secara konkrit didelegasikan kepada institusi khusus, yaitu Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syari'at Islam (LP2SI).

Dalam implementasinya *Gerbang Salam* ini digerakkan dengan pendekatan struktural dan kultural. Secara struktural melalui tangan pemerintah daerah salah satunya dengan mengeluarkan himbauan dan peraturan-peraturan untuk meminimalisir tindakan-tindakan asusila di Pamekasan. Salah satunya adalah Perda larangan pelacuran, dan lain-lain. Secara kultural gerakan ini dijalankan melalui pendidikan dan pemeliharaan dalam bidang sosial budaya yang Islami.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan Gerbang Salam ini mengalami dinamika pasang surut. Sejak Gerbang Salam digulirkan melalui keputusan Bupati Pamekasan No.188/126/441.012/2002 ternyata masih belum terealisasi secara optimal. Selama lebih dari 10 tahun hingga sekarang tahun 2017 kegiatan Gerbang Salam hanya mampu menghasilkan beberapa program dan Perda. Antara lain adalah :¹ Perda No 18 tanggal 17 Juni Tahun 2004 tentang Larangan Terhadap Pelacuran , Perbup No 13 tanggal 27 Desember Tahun 2006 tentang

¹ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pamekasan

Sistem penyelenggaraan Pendidikan Agama, Perda No 7 tahun 2008 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, Perda No 4 tahun 2014 tentang keterampilan membaca al-Qur'an bagi peserta didik beragama Islam, Perda No 05 tahun 2014 tentang penertiban kegiatan pada bulan ramadhan, Perda No 14 tahun 2014 tentang tata kelola hotel, penginapan, dan rumah kos. Di samping itu telah muncul sebelumnya Perda Nomor 18 tanggal 32 November Tahun 2001 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol.

Dalam implementasinya, sinergi antar elemen yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Gerbang Salam ini seperti mengalami disharmonisasi. Misalnya, LP2SI sebagai lembaga khusus yang dikonsentrasikan untuk menjadi pelaksana program Gerbang Salam merasa kurang mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah daerah, bahkan merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan tertentu. Interaksi dan komunikasi antar elemen ini menampakkan adanya problem yang tentunya mempunyai implikasi bagi pengembangan dan pelaksanaan Gerbang Salam itu sendiri. Semua itu membuktikan bahwa tingkat optimalitas capaian program Gerbang Salam masih menghadapi sejumlah persoalan.

Kondisi tersebut menggerakkan peneliti untuk mengetahui lebih jauh sampai dimana Gerbang Salam ini dikonsepsi dan sampai dimana direalisasikan. Penelitian ini penting dilakukan karena Pamekasan mempunyai potensi yang besar dalam keagamaan, baik berupa penduduk, institusi keagamaan, institusi pendidikan keagamaan, dan lain-lain. Inisiatif dan semangat yang besar untuk melaksanakan Gerbang Salam merupakan potensi lain yang muncul dari tokoh dan berbagai elemen masyarakat yang banyak. Namun sampai saat ini Gerbang Salam, baik secara teoritis maupun praktisnya masih belum menemukan formulasi yang jelas dan optimal.

Dengan menggunakan analisis teori fungsionalisme struktural, penelitian ini diharapkan bisa menjawab tingkat optimalitas dan ketimpangan realisasi Gerbang Salam di Pamekasan, baik secara teoritis dan praktis. Analisis AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency) antara struktur dan fungsi, fungsi manifest dan fungsi laten, dan lain sebagainya dari bagian analisis teori fungsionalisme struktural ini akan mencari titik-titik kelemahan dan potensi-potensi yang bisa dikemukakan. Analisis ini juga akan menelusuri potensi struktur sosial di lingkungan Pamekasan, baik dalam bentuk diskripsi maupun gambaran skema, dan hubungan-hubungan fungsional antar struktur tersebut. Dengan demikian, kelemahan dapat dicegah dan potensi dapat dikembangkan untuk mewujudkan integrasi sosial dan keseimbangan dalam upaya pelaksanaan Gerbang Salam di Pamekasan.

Metode Penelitian

Melihat permasalahan tersebut maka metode penelitian ini adalah pemahaman (*meaning*). Karena itu, jenis penelitian ini adalah kualitatif. Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan pengertian, makna dan nilai. Dengan kata lain, karakteristik umum penelitian kualitatif adalah lebih menekankan kualitas secara alamiah karena berkaitan dengan pengertian, konsep, nilai-nilai dan ciri-ciri yang melekat pada obyek penelitian.²

Jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah dan foto. Neuman, yang dikutip oleh Somantri menyebutkan, data yang ada dalam penelitian kualitatif bersifat empiris, terdiri dari dokumentasi beragam peristiwa, rekaman dari ucapan, tingkah laku, dokumen-dokumen tertulis, dan berbagai bentuk visual yang ada dalam sebuah fenomena sosial.³

Ada pun sumber data penelitian ini meliputi wawancara sebagai sumber primer, dokumentasi, observasi sebagai sumber sekunder. Wawancara dilakukan pada pihak-pihak yang terlibat langsung sebagai pelaksana Gerbang Salam. Adapun dokumentasi mencakup data-data dokumentatif berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, program, dan sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan Gerbang Salam, sedangkan observasi adalah tentang kondisi sosial masyarakat Pamekasan, baik di lingkungan aparaturnya pemerintahan, sekolah, dan lain-lain.

Motif Sosial Lahirnya Gerbang Salam

Gerbang Salam lahir di tengah kondisi masyarakat Pamekasan yang memiliki dorongan dan perasaan keagamaan yang kuat tapi disisi yang lain masih ada situasi dan kondisi yang menampakkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral ajaran agama Islam, seperti tindakan asusila, peredaran minuman beralkohol, dan sebagainya. Situasi yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang banyak dianut masyarakat Pamekasan secara mendalam inilah yang menjadi titik awal pemicu lahirnya gerakan pembangunan masyarakat Islami (Gerbang Salam) di Pamekasan. Gerakan ini dimotori oleh para kiyai sebagai elit masyarakat yang mempengaruhi dinamika politik di Pamekasan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh KH. Munib Panempan, seorang tokoh

²Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm., 5

³ Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif", Makara, jurnal ilmu sosial humaniora Vol. 9, No.2 Desember 2005 (Jakarta, UI), hlm. 60

lapangan yang terlibat langsung dalam mendorong gerakan-gerakan keislaman di Pamekasan.

Berdasarkan wawancara bahwa adanya kiprah kiyai sebagai elit lokal dalam mempengaruhi iklim sosial yang berdasarkan pada perasaan keagamaan melalui kebijakan politik. Adanya pengaruh tersebut dapat dilacak dari bagaimana peran dan pengaruh para elit lokal terhadap situasi dan dinamika politik lokal di Pamekasan menjelang beberapa tahun sebelum munculnya deklarasi Gerbang Salam. Situasi dan dinamika politik lokal tersebut tidak bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi perpolitikan nasional.

Momentum reformasi pada tahun 1998 menjadi titik awal terbukanya kran kebebasan, khususnya dalam bidang politik dan pembangunan yang dinyatakan dengan munculnya perubahan peraturan perundang-undangan tentang partai politik dan pemilihan umum dan diikuti dengan terbukanya otonomi daerah melalui UU No 22 tahun 1999. Situasi ini disambut dengan munculnya kekuatan-keuatan politik identitas (yang berlabel agama), bagaikan tumbuhnya cendawan di musim hujan.⁴ Ada partai nasional sekuler, ada partai yang berbasis Ideologi Islam, dan ada partai nasional yang berbasis massa Islam. Disisi lain, otonomi daerah memberikan ruang dan kesempatan bagi daerah-daerah untuk dapat membangun dan mengelola daerahnya masing-masing. Situasi demikian menjadi angin segar bagi kelompok Islam di Pamekasan untuk dapat mewarnai perpolitikan lokal.

Disisi yang lain, ada para kiyai sebagai kaum elit lokal yang sejak semula mempunyai pengaruh yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Para kiyai ini dapat dipandang sebagai elit karena merupakan kelompok individu yang memiliki pengaruh yang sering menentukan kehidupadan dan perubahan masyarakat, meski perubahan masyarakat tidak sepenuhnya tergantung dari peran yang ia atau mereka mainkan. Kemudian disebut elit lokal karena peranan pengaruh yang mereka mainkan berada dalam batasan geografis, seperti provinsi, kabupaten, atau tingkat desa.⁵

Eksistensi kiyai sebagai elit lokal yang kuat dapat dilihat dari kedudukan dan pengaruhnya di tengah Pamekasan. Bahkan dalam pandangan masyarakat Madura, kedudukan kiyai sangat tinggi dan terhormat dibanding masyarakat biasa. Hal itu sesuai dengan falsafah ; *Bhuppa' Bhappu, Ghuru, Rato* (Bapak-Ibu, Guru, dan Pemerintah). Falsafah ini menjadi struktur pandangan sosial

⁴ Zainuddin Syarif, "Pergeseran Perilaku Politik Kiyai dan Santri", Al-Tahrir, Jurnal Pemikiran Islam vol 16 no 2 November 2016 (Ponorogo, IAIN), hlm. 299

⁵ Abdul Chalik. *Pertarungan Elit dalam Politik Lokal*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2017), hlm. 25-26

penghormatan masyarakat terhadap kiyai, bahkan terkadang melebihi dari pada penghormatan mereka terhadap orang tua. Sehingga kiyai secara otomatis menjadi elit lokal yang senantiasa mempunyai pengaruh yang kuat karena penghormatan dan penghargaan yang tinggi dari masyarakat terhadap sosok kiyai.

Posisi sosial tersebut memungkinkan para kiyai untuk dapat tampil memegang kekuatan sebagai pengendali masyarakat yang pada puncaknya memerankan diri dalam percaturan politik lokal. Pengaruh mereka yang kuat itu dapat dilihat dalam momen-momen perhelatan politik. Dalam konteks ini misalnya pengaruh elit lokal ini dapat dilihat dalam membesarkan partai politik tertentu, seperti contoh PPP. Meski partai ini telah ditinggalkan oleh sejumlah “vokalisnya” di parlemen akibat kekuatan Islam politik yang sudah disintegrasikan, namun di tingkat lokal hal itu sama sekali tidak berdampak pada perolehan suara pada pemilu 2004. PPP tetap merajai bumi Gerbang Salam ini karena masih ditopang oleh dua kekuatan pesantren terbesar di Pamekasan, yaitu PP. Mambaul Ulum Bata-bata dan LPI Darul Ulum Banyuwanyar.⁶ Dominasi pengaruh elit lokal ini dapat dilihat juga dalam pemilihan Bupati Pamekasan baik secara tidak langsung (yang dipilih oleh DPRD pada 30 Maret 2003) maupun yang dipilih langsung oleh rakyat pada 5 Maret 2008. Bahkan pada perhelatan Pilkada langsung tahun 2008 itu, kemenangan Bupati terpilih saat itu tidak lepas dari kekuatan kharismatik KH. Abd. Hamid AMZ, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata.⁷

Eksistensi para kiyai yang kuat dalam mempengaruhi politik lokal dan ditambah momentum reformasi yang membuka kran otonomi daerah menjadi modal dan pintu masuk bagi perjuangan yang ingin memasukkan nilai-nilai keislaman ke dalam kebijakan politik lokal dan pembangunan. Sebagai hasilnya, munculah Perda Nomor 18 tanggal 32 November Tahun 2001 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol. Kemudian dibentuk Lembaga Pengkajian dan Penerapan syari’at Islam (LP2SI) melalui surat keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/126/441.012/2002 tanggal 30 April 2002. Dan tidak lama kemudian muncul deklarasi gerakan pembangunan masyarakat Islami (Gerbang Salam) pada tanggal 4 November 2002 di depan Masjid Agung *Asy-syuhada’* Pamekasan oleh seluruh Ormas Islam yang diwakili oleh Drs. KH. Khalilurrahman (ketua PCNU saat itu).⁸

⁶ Zainuddin Syarif, “Pergeseran Perilaku Politik Kiyai dan Santri”, hlm. 300-301

⁷ Ibid., 303

⁸ Tim LP2SI, *Mengenal Gerbang Salam* (Pamekasan: LP2SI, 2010), hlm. 3

Potret Pelaksanaan Gerbang Salam di Pamekasan

Ada asumsi dari sebagian pihak bahwa pelaksanaan Gerbang Salam (istilah akronim dari Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) di Pamekasan ini adalah penegakan *syari'at* Islam secara kaffah, dalam artian menyangkut hukum pidana dan perdata Islam. Padahal secara praktis, gerakan ini dimaksudkan hanya untuk mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Upaya ini sebenarnya merupakan tahapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya jangka panjang para elit lokal (kiyai dan ulama) dan masyarakat Pamekasan untuk mewujudkan pemberlakuan *syari'at* Islam melalui peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.⁹ Hal tersebut sebagaimana yang diperkuat dari pemaparan wawancara dengan Kholil Asya'ari mantan DPRD Pamekasan periode 2009-2014 dan selaku Wakil Bupati Pamekasan yang baru saja demisioner.

LP2SI sebagai lokomotif dari gerakan ini memberikan perspektif tentang istilah *syari'ah* yang melekat pada namanya Lembaga Pengkajian dan Penerapan "*Syari'ah Islam*". Melalui buku saku *Mengenal Syari'at Islam*, tim LP2SI memaparkan luasnya garapan *syari'ah* Islam yang meliputi bidang *aqidah*, *amaliyah*, dan *akhlaq* yang semuanya mencakup tata cara hubungan antara manusia dengan penciptanya, sesama manusianya, dan lingkungannya. Bidang *aqidah* merupakan dasar-dasar keyakinan yang harus dimiliki setiap individu muslim, bidang *amaliyah* mencakup ibadah (ritual) dan *mu'amalah* (sosial) berupa transaksi-transaksi, *uqubah*, *jinayah*, *mukabat*, dan semua yang mengatur hubungan antar sesama manusia, sedangkan bidang *akhlaq* memiliki cakupan penanaman kebiasaan dan karakter yang baik terhadap Allah, masyarakat dan lingkungannya.¹⁰

Gerbang Salam yang mengandung konsep dan implementasi *syari'ah* Islam tidak dalam rangka menyentuh semua persoalan yang luas itu, namun secara spesifik menghindari ranah hukum yang sudah menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Oleh karena itu, LP2SI memberikan perspektif secara spesifik bahwa pelaksanaan Gerbang Salam ini dimaknai sebagai upaya bersama yang dilakukan secara sistematis dan terus

⁹ Holifatur Rafi'ah. *Sejarah Gerbang Salam Di Kabupaten Pamekasan Madura*. (Skripsi: Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), hlm.37

¹⁰ Tim LP2SI, *Mengenal Gerbang Salam*, hlm.12-21

menerus dalam rangka mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Sering dengan pengertian tersebut, maka tujuan Gerbang Salam adalah terbentuknya tatanan kehidupan individu dan masyarakat Pamekasan yang Islami menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tujuan tersebut dirinci kembali ke dalam beberapa program pokok sebagaimana berikut:

1. Membangun keluarga yang Islami
2. Membangun kondisi pendidikan yang Islami
3. Membangun kondisi sosial budaya yang Islami
4. Membangun kondisi lingkungan dan kesehatan yang Islami
5. Membangun aparatur pemerintah yang berjiwa Islami

Optimalitas Pelaksanaan Gerbang Salam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalitas berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadi paling baik), paling tinggi, dan sebagainya).¹² Sehingga optimalitas pelaksanaan berarti upaya pelaksanaan yang optimal, yang paling baik, yang paling tinggi dan yang paling sempurna. Maka membicarakan optimalitas pelaksanaan Gerbang Salam bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Gerbang Salam dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.

Untuk mengawali analisis tentang optimalitas pelaksanaan Gerbang Salam di Pamekasan, penulis mengumpulkan data dari beberapa informan melalui proses wawancara. Salah satunya adalah wawancara dengan Ketua LP2SI sendiri, Moh. Zahid, M.Ag. Sebagaimana yang disampaikan Moh. Zahid itu, pada dasarnya sebuah gerakan dakwah tidak akan pernah mencapai titik sempurna jika diukur dari tujuan akhirnya, yaitu Islam *Kaffah*. Namun jika diukur dari sejauh mana yang kita lakukan maka hal itu relatif tergantung periode kepemimpinan daerah yang dapat mempengaruhi terhadap kegiatan yang ingin dijalankan maka perlu diapresiasi. Sebab bagaimana pun ruang usaha yang ingin dilakukan itu dibatasi dengan otonomi daerah dan hirarki peraturan perundang-undangan.

Menurut Umar Bukhori, pelaksanaan Gerbang Salam itu melalui dua jalur, struktural dan kultural. Adapun optimalitas pelaksanaannya mengalami pasang

¹¹ Ibid, hlm. 2-3

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka, 1994), hlm 800

surut. Namun secara kasat mata, pelaksanaannya sudah menghasilkan perda, diantaranya perda larangan minuman beralkohol, perda pengelolaan zakat, dan lain. Adapun di jalur kultural (yaitu jalur yang tidak mempunyai jalur struktur sama sekali) kita telah melakukan pendekatan ke banyak pihak, yaitu ke sekolah-sekolah, kecuali ke keluarga yang masih belum tersentuh sama sekali karena disana belum diketahui memasuki lewat jalur mana”.¹³

Penuturan Umar Bukhari tersebut mengungkap dengan jelas adanya situasi dan kondisi yang kurang optimal dalam pelaksanaan Gerbang Salam. Hal itu terjadi karena tingkat intensitas pelaksanaannya yang mengalami pasang surut. Meski demikian dia mengakui bahwa sudah ada peningkatan dalam pelaksanaan Gerbang Salam itu dengan indikasi adanya beberapa pelaksanaan program yang dimunculkan, baik melalui jalur kultural maupun struktural.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Umar Bukhari tersebut, Pemerintah kabupaten Pamekasan sendiri memberikan perspektifnya dalam hal ini melalui sekretaris daerahnya, Bapak Muhammad Alwi. Kepada penulis, dia memberikan gambaran dan pandangannya tentang optimalitas pelaksanaan Gerbang Salam sebagaimana berikut :

*“Ukurannya relatif. Kita berupaya untuk menyampaikan ke masyarakat. Tapi secara fisik itu sudah banyak peningkatan. Misalnya pemakaian busana yang islami itu sudah masuk di dalamnya. Kemudian kita juga memulai dan mengakhiri kegiatan dengan membaca do’a dan sebagainya. Jadi yang kita dorong itu adalah perilaku-perilaku masyarakat. Bukan pada syari’ahnya. Jadi ini adalah gerakan moral terhadap masyarakat. Kalau ditanya optimalnya, intinya sudah ada peningkatan, tapi kita upayakan untuk optimalisasi”.*¹⁴

Gambaran serupa diberikan oleh Dr. Supandi, M.Pd.I selaku akademisi dan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Berikut pandangannya tentang optimalitas pelaksanaan gerbang salam:

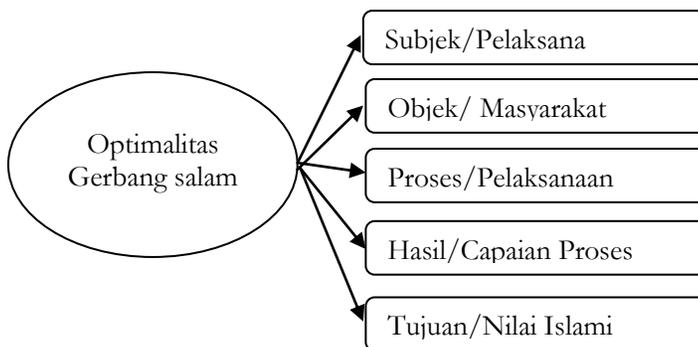
“Kalau menurut pandangan sementara secara umum maka gerbang salam itu belum optimal, karena dari sisi gerbang salamnya sendiri masih banyak pro dan kontra. Kalau dilihat program-program yang sudah dilakukan oleh penggiat program gerbang salam ada beberapa hal pengetahuan saya itu LP2SI melakukan upaya-upaya semacam instrumen menciptakan masyarakat kepada hithab keislaman akan tetapi hal itu hanya dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Kemudian sel-sel itu juga

¹³ Wawancara dengan Umar Bukhari, sekretaris LP2SI pada tanggal 05-Juli-2018

¹⁴ Wawancara dengan Bpk. Alwi, Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan 17-Juli 2018

masih menempel pada kegiatan-kegiatan pendidikan yang sudah ada, baik kegiatan sekolah maupun non sekolah. Itu yang bersifat pendidikan. Kalau yang bersifat kebijakan itu tergantung pimpinannya. Kemarin ketika masanya Kholilurrahman sebagai Bupati sangat dimaksimalkan. Contoh seperti kebudayaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti kerapian sapi diminimalisir. Kalau dilihat secara global masih belum sama sekali tersentuh”¹⁵

Pemaparan data di atas menunjukkan adanya bermacam pandangan dalam melihat optimalitas pelaksanaan Gerbang Salam. Ada yang melihat dari sisi proses, ada yang dari sisi hasil, dan ada yang dari sisi tujuannya. Yang dimaksud proses disini adalah pelaksanaan kegiatan yang mencakup didalamnya adalah dakwah *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil adalah capaian-capaian dari pelaksanaan itu sendiri. Dan yang yang dimaksud tujuan adalah pengamalan nilai-nilai ajaran Islam secara *kaffah*. Selain itu, dapat pula dilihat dari sisi pelaksana dan masyarakat umum kabupaten Pamekasan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Gambarannya adalah sebagaimana berikut :



Gambar Optimalitas Pelaksanaan Gerbang Salam dari berbagai sisi

Secara umum, pelaksanaan Gerbang Salam belum optimal berdasarkan asumsi di atas. Untuk mengukur kebenarannya, data-data dari beragam lapisan tersebut sudah menunjukkan relevansinya. Hal tersebut berdasarkan teori koherensi yang menyebutkan adanya kebenaran suatu pengetahuan jika sudah menunjukkan adanya konsistensi atau relevansi antara satu pernyataan dengan

¹⁵ Wawancara dengan Supandi, Akademisi dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 07-07-2018

pernyataan-pernyataan yang lain.¹⁶ Namun faktanya berdasarkan teori korespondensi maka pembuktiannya harus dengan cara merujuk ke lapangan untuk melihat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan.¹⁷

Gerbang Salam telah ditetapkan sebagai model dan strategi dakwah berdasarkan Surat Keputusan Bupati pamekasan Nomor 183/340/44.131/2009 tanggal 19 Oktober 2019. Sementara LP2SI (Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syari'at Islam) adalah lembaga yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah kabupaten Pamekasan untuk merumuskan konsep dan implementasi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang Islami. Konsep dan implementasinya itu disebut dengan Gerbang Salam.¹⁸ Maka relevansi untuk melihat pelaksanaan Gerbang Salam dapat dilihat dari dua level, yaitu pertama adalah pengkajian atau konsep dan kedua adalah implementasinya.

1. Level Pengkajian (konsep)

Sebagai model dan strategi dakwah, gerbang salam sudah semestinya merumuskan pengkajian konsep sehingga dalam hal ini ada beberapa buku yang sudah diterbitkan oleh LP2SI untuk melakukan penguatan terhadap pelaksanaan Gerbang Salam. Buku tersebut antara lain adalah "*Mengenal Syari'at Islam*", "*Mengenal Gerbang Salam*", dan "*Pembangunan Pendidikan Nuansa Islami Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*". Buku yang pertama berisi pengenalan mendasar tentang *syari'ah* Islam, yang meliputi pengertian, prinsip, dan ruang lingkungannya. Buku kedua berisi pengenalan konsep Gerbang Salam itu sendiri, meliputi pengertian, visi, misi, strategi, dan rencana program. Dan buku ketiga berisi konsep program kemahiran membaca *al-Qur'an* dan program kemahiran dan pembiasaan beribadah serta berperilaku Islami melalui jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Jadi ketiga buku tersebut berkesinambungan, dari yang bersifat umum ke yang spesifik dan dari ranah teoritis ke ranah praktis. Buku "*Mengenal Syari'ah*" lbh bersifat umum karena menjelaskan semua ruang lingkup *syari'ah*, baik dari sisi *aqidah*, *amaliyah*, dan *akhlaq*. Sementara buku "*Mengenal Gerbang Salam*" lebih spesifik pada penanaman nilai-nilai Islami melalui gerakan dakwah kultural dan struktural dengan strategi-strateginya. Dan diturunkan lagi ke dalam buku ketiga yang secara praktis merupakan konsep teknis satu program diantara program kegiatan Gerbang Salam yang lain.

¹⁶ Amsal Bakhtiar. *Filsafat Ilmu*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 116

¹⁷ Ibid, 112

¹⁸ Tim LP2SI, *Mengenal Gerbang Salam*, hlm. 1

Jika melihat pada konsepnya sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam buku *"Mengenal Gerbang Salam"*, maka visi Gerbang Salam adalah Pamekasan yang Islami. Misionya adalah mewujudkan individu dan keluarga yang Islami, pendidikan yang Islami, dan aparatur pemerintah yang Islami. Sedangkan tujuannya adalah terbentuknya tatanan kehidupan individu dan masyarakat Pamekasan yang Islami menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹⁹

Untuk mencapai tujuan tersebut ada strategi, pokok-pokok dan rincian program yang menjadi garapan gerbang salam ini. Ada pun strateginya adalah :

- a. Membangun situasi dan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya perilaku yang Islami di lingkungan keluarga, pendidik, dan aparatur pemerintah.
- b. Membangun motivasi dan kesadaran setiap individu muslim akan pentingnya sikap dan perilaku Islami.
- c. Memadukan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan kabupaten Pamekasan dengan kebijakan dan pelaksanaan program gerbang salam.
- d. Membangun kelompok pelopor (pentauladanan) di lingkungan keluarga, pendidikan, dan aparatur pemerintah.
- e. Menggalang kerja sama dan kemitraan
- f. Melembagakan dan membudayakan sikap dan perilaku yang Islami dalam seluruh aspek kehidupan
- g. Membangun sosial budaya masyarakat secara komprehensif dan terpadu.

Strategi-strategi tersebut diarahkan pada 5 sasaran yang menjadi ruang lingkup Gerbang Salam, yaitu membangun keluarga yang Islami, pendidikan yang Islami, sosial budaya yang Islami, lingkungan dan kesehatan yang Islami, dan membangun aparatur pemerintah yang Islami.

Jika digambarkan secara ringkas maka desain strategi diatas terdiri dari komponen perilaku dan kesadaran, komponen budaya dan lingkungan, komponen kebijakan, dan komponen kerja sama. Komponen perilaku dan kesadaran merupakan sasaran individual, komponen budaya dan lingkungan merupakan sasaran kultural, dan komponen kebijakan dan kerjasama atau kemitraan merupakan sarana untuk mencapai sasaran yang dimaksud. Semua itu dijalankan dalam 5 ruang lingkup program Gerbang Salam, yaitu keluarga yang Islami, pendidikan yang Islami, sosial budaya yang Islami, lingkungan dan kesehatan yang Islami, dan aparatur pemerintah yang Islami.

Maka melihat pada peta-peta konsep di atas, pengkajian konsep Gerbang Salam ini belum optimal. Sebab diantara banyak garapan yang menjadi strategi, sasaran, dan ruang lingkungannya maka pendidikan yang Islami yang sudah

¹⁹ Ibid, hlm. 3

terkonsep dalam sebagian aspeknya, yaitu program kemahiran membaca al-Qur'an dan program kemahiran beribadah dan berperilaku yang Islami. Sementara itu masih banyak garapan-garapan yang lain di dalam di ruang lingkungannya.

2. Level Penerapan

Di level penerapan, optimalitas pelaksanaan Gerbang Salam bisa dilihat dari berbagai sisi ; pelaksana, masyarakat sebagai objek, pelaksanaan itu sendiri, hasil capaian, dan tujuan yang diharapkan dari gerbang salam.

Dari sisi pelaksana, Gerbang Salam sebenarnya tidak hanya menjadi tugas LP2SI, meski lembaga ini dibentuk secara khusus oleh pemerintah kabupaten Pamekasan untuk melakukan pengkajian dan penerapan *syari'at* Islam. Namun secara umum, gerbang salam menjadi tugas bersama semua lapisan masyarakat pamekasan, mulai dari kepala dan anggota keluarga, ulama dan tokoh masyarakat, LP2SI, MUI dan berbagai ormas Islam, LSM, mahasiswa dan media massa, dan pemerintah kabupaten, para pimpinan SKPD, DPRD Pamekasan dan berbagai instansi pemerintah lainnya.²⁰ Gerbang Salam menurut ketua LP2SI sebenarnya adalah Gema Salam (Gerakan bersama Masyarakat Islam). Berikut ini ringkasan dari yang disampaikan:

Hampir semua pihak dari semua elemen masyarakat. Karena sesungguhnya gerbang salam itu adalah Gema Salam (artinya adalah gerakan bersama masyarakat Islam). Artinya gerbang salam itu tidak bisa dipikulkan pada LP2SI, pemerintah dan ormas, tapi semua pihak sesuai dengan tugasnya. Contoh kecilnya adalah keluarga. Jika ingin membina keluarga yang islami maka yang paling berpotensi melakukannya adalah kepala anggota keluarga. Jadi intinya semua pihak, baik parpol, pemerintah, akademisi, ulama, maupun semuanya terlibat sehingga diawal-awal itu tampak guyub, namun akhirnya berjalan surut.²¹

Petikan wawancara tersebut menunjukkan bahwa Gerbang Salam adalah tugas dan milik semua lapisan masyarakat Islam. Gerakan ini pun dibentuk oleh semua lapisan.²² Sehingga dalam struktur kepengurusan LP2SI yang menjadi lokomotif dari gerakan ini terdiri dewan penasehat, dewan pakar, dan dewan pelaksana yang anggotanya terdiri unsur organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh

²⁰ Ibid., hlm. 5

²¹ Wawancara dengan Moh. Zahid, Ketua LP2SI pada tanggal 22-Juli-2018

²² Hasil wawancaradengan mantan wakil bupati pamekasan demisioner (Khalil Asy'ari), sebagai berikut: Gerbang salam itu bermula dari hasil musyawarah dari berbagai pihak, dari pemerintah daerah, dari akademisi, dari lembaga-lembaga, ada kejaksanaan dan kepolisian, dan juga ulama.

agama atau ulama, akademisi dan pemerintah kabupaten Pamekasan. Namun faktanya, kebersamaan semua elemen itu berjalan surut.

Hal ini juga dituturkan oleh sekretaris LP2SI, Bapak Umar Bukhari sebagai berikut:

Banyak orang yang salah paham bahwa yang seharusnya melakukan Gerbang Salam itu hanyalah LP2SI, padahal semua orang berkewajiban. Jadi proses dakwahnya adalah tugas bersama. Jadi LP2SI hanya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menginisiasi dua tujuan utamanya itu, sesuai namanya adalah lembaga pengkajian dan penerapan.²³

Berdasarkan penuturan itu, banyak kalangan menilai bahwa gerbang salam adalah tugas dari LP2SI saja. Penilaian ini berpengaruh terhadap partisipasi berbagai pihak untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan gerbang salam. Sehingga ketika ada problem di lapangan yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan mencoreng gerbang salam maka yang dipersoalkan secara langsung adalah LP2SI, kemana LP2SI. Padahal tanpa adanya LP2SI, gerakan dakwah *amar ma'ruf dan nahi munkar* itu sudah menjadi kewajiban bersama semua pihak yang beragama Islam.

Dari sisi pelaksanaannya, program kegiatan Gerbang Salam ini banyak dilaksanakan melalui jalur pendidikan baik secara kultural maupun struktural. Secara kultural misalnya yang melewati kerja sama dengan pihak non struktur, seperti ke MKKS, baik dalam bentuk lomba, sosialisasi, sekolah rintisan Gerbang Salam, pondok ramadhan, dan lain sebagainya. Sedangkan secara struktural, seperti kerja sama dengan dinas pendidikan dan kementerian agama dalam merumuskan penertiban buku pedoman penyusunan tata tertib peserta didik sekolah/madrasah di kabupaten pamekasan. Ada juga melalui Perda, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan no 4 tahun 2014 tentang keterampilan membaca al-Qur'an bagi peserta didik beragama Islam. Sementara itu, untuk ranah dan jalur yang lain belum bisa disentuh secara optimal, seperti ke ranah keluarga yang merupakan skop kecil dari masyarakat belum sama sekali. Hal ini sebagaimana penuturan Sekretaris LP2SI sendiri:

"Kita telah melakukan pendekatan ke banyak pihak, yaitu ke sekolah-sekolah, kecuali ke keluarga yang masih belum tersentuh sama sekali karena disana belum diketahui memasuki lewat jalur mana."²⁴

Dari sisi masyarakat sebagai objek, pelaksanaan Gerbang Salam tidak menyentuh semua lapisan masyarakat. Dalam hal ini yang banyak menjadi

²³ Wawancara dengan Umar Bukhari, sekretaris LP2SI pada tanggal 05-Juli-2018

²⁴ Wawancara dengan Umar Bukhari, sekretaris LP2SI pada tanggal 05-Juli-2018

sasaran adalah peserta didik di lingkungan pendidikan, yang salah satunya melalui program rintisan sekolah Gerbang Salam. Meski demikian program ini pun tidak menyentuh semua sekolah. Ada beberapa sekolah tertentu sebagaimana berikut:

Data Sekolah Katagori Rintisan Sekolah Gerbang Salam.²⁵

No	Nama Sekolah Rintisan	Ket	Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Kowel Pamekasan	Katagori Sekolah Dasar	2013
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 ProppoPamekasan	Katagori Sekolah Dasar	2013
3	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3 Pamekasan	Katagori Sekolah Menengah	2013

Jadi melihat jumlah sasaran di atas masih sangat jauh dari kata optimal. Kegiatan itu pun tidak dilaksanakan secara kontinui. Dimulai tahun 2013 dan tindak lanjutnya tidak diketahui.

Implementasi lainnya di jalur pendidikan adalah program kemahiran membaca *al-Qur'an* bagi jenjang sekolah dasar dan menengah. Program ini setiap tahun dan sampai saat ini sudah memasuki tahun ketiga. Namun sasaran yang bisa dilaksanakan masih di jenjang pendidikan dasar, yaitu uji kompetensi membaca al-qur'an untuk anak kelas 6 SD, bekerjasama dengan Dikdas (Pendidikan Dasar) dalam rangka penerapan Perda. Uji kompetensi itu dilengkapi dengan sertifikat. Sedangkan di jenjang pendidikan menengah belum terlaksana sama sekali.²⁶

Dari sisi hasil capaiannya, masih tampak adanya situasi dan kondisi yang jauh dari harapan dan tujuan pelaksanaan Gerbang Salam. Pamekasan sebagai kota yang memiliki iklim religius yang tinggi; shalat berjama'ah aktif di masjid-masjid dan pengajian umum dilaksanakan di bermacam tempat mulai dari masjid, lembaga-lembaga pendidikan, ormas-ormas Islam, hingga tempat-tempat umum. Namun disisi yang lain masih menampilkan wajah yang berbeda. Misalnya kondisi pertokoan yang masih belum tutup menjelang masuknya waktu shalat ini sudah menjadi pemandangan umum dimana-mana. Juga kondisi yang terjadi setiap malam takbir hari raya yang sejatinya mengungkapkan syukur

²⁵ Supandi. *Model Pengembangan Masyarakat melalui Penguatan Pendidikan Islam (Studi Kebijakan Pemerintah tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Islam di Pamekasan)*. Surabaya : disertasi pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017

²⁶ Wawancara dengan Umar Bukhari, sekretaris LP2SI pada tanggal 05-Juli-2018

dengan melakukan takbir keliling, namun kesempatan ini juga menjadi ajang memutarakan musik-musik dugem dengan jogetnya sambil mengelilingi kota. Semua itu tampak bertolak belakang dengan nilai-nilai keislaman.

Selain itu, masih ada saja kasus-kasus kesusilaan yang terjadi dan diterima di tengah-tengah sebagian masyarakat. Meski jumlahnya relatif tidak banyak, tapi hal ini cukup menciderai Pamekasan sebagai kota Gerbang Salam. Berikut ini adalah beberapa jumlah angka yang berhasil dikumpulkan:

Data PSK di Pamekasan berdasarkan aksi sweping dari tahun 2014 sampai 2018²⁷

TAHUN	JUMLAH PSK	KETERANGAN
2014	22	Operasi Yustisi penegakan Perda kab. Pamekasan No 18 tahun 2014 tentang larangan terhadap pelacuran oleh Satpol PP Pamekasan.
2015	0	
2016	2	
2017	3	
2018	0	
JUMLAH	27	

Sumber: Satpol PP Pamekasan

Berdasarkan data di atas, tahun 2014 memiliki jumlah angka PSK terbanyak di Pamekasan, yaitu 22 orang berdasarkan aksi sweping yang dilakukan tiap bulan. Tahun 2015 dan 2018 data nihil. Sedangkan tahun 2016 ditemukan 2 PSK berdasarkan aksi sweping satu kali, dan pada tahun 2017 ditemukan 3 PSK berdasarkan aksi sweping 3 kali selama setahun. Jumlah tersebut tersebar di beberapa titik di kabupaten Pamekasan. Semua itu menunjukkan adanya aktivitas masyarakat yang masih menciderai kondisi kota Gerbang Salam.

Dari bermacam sisi yang telah disebutkan, pelaksanaan Gerbang Salam belum optimal, apalagi jika dipandang dari sisi tujuan nilai-nilai islam yang kaffah. Masyarakat Pamekasan, baik secara kualitas maupun kuantitas masih membutuhkan gerakan-gerakan dakwah secara optimal.

Analisis Kendala Dalam Sistem Sosial

Analisis kendala dalam optimalitas pelaksanaan Gerbang Salam harus dilihat dari eksistensi sistem sosial secara integral. Apa yang dimaksud dengan sistem sosial adalah suatu sistem tindakan yang terbentuk dari sistem sosial berbagai individu, yang tumbuh dan berkembang tidak secara kebetulan, akan tetapi tumbuh dan berkembang diatas standar penilaian umum atau norma-

²⁷ Sumber Data dari SAT POL PP Kabupaten Pamekasan.

norma sosial yang disepakati oleh para anggota masyarakat. Norma-norma sosial inilah yang membentuk struktur sosial. Sementara interaksi sosial terjadi karena adanya komitmen terhadap norma-norma sosial yang menghasilkan daya untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan diantara anggota masyarakat dengan menemukan keselarasan satu sama lain di dalam suatu tingkat integrasi sosial tertentu.²⁸

Jadi ada standar penilaian umum atau norma-norma sosial yang menjadi konsensus bersama yang menumbuhkan interaksi sosial antar individu, lembaga, atau elemen masyarakat sehingga menjadi apa yang disebut sistem sosial. Dalam konteks ini, norma-norma sosial yang menjadi konsensus bersama adalah pengamalan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang kemudian dilembagakan dalam model gerakan pembangunan masyarakat Islam (Gerbang Salam) atau gerakan bersama masyarakat Islam (Gema Salam).

Gerbang Salam bukan sesuatu yang dilahirkan secara kebetulan. Ia lahir dari sebuah konsensus dan komitmen berbagai struktur sosial, mulai dari tokoh masyarakat, pemerintah kabupaten Pamekasan mulai dari jajaran eksekutif sampai legislatif bersama instansi-instansi yang berada di bawahnya, organisasi-organisasi sosial, akademisi, mahasiswa dan media masa. Sebagaimana yang disampaikan ketua LP2SI sendiri ketika ditanya tentang siapa saja yang terlibat dalam perumusan gerbang salam ini. Berikut petikan jawabannya:

Hampir semua pihak dari semua elemen masyarakat. Karena sesungguhnya gerbang salam itu adalah Gema Salam (artinya adalah gerakan bersama masyarakat Islam).²⁹

Karena ini dilahirkan dari konsensus dari suatu sistem sosial maka dukungan fungsional dari elemen-elemen masyarakat tersebut selalu diperlukan dalam setiap gerak dan usaha membangun masyarakat berdasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Jika tidak demikian maka berarti telah terjadi disfungsi yang akan bisa menyebabkan adanya ketidak seimbangan dalam mempertahankan suatu sistem sosial. Hal ini sebagaimana yang dapat dilihat melalui analisis teori struktural fungsional yang disebut juga dengan teori fungsional atau fungsionalisme struktural. Teori ini juga disebut dengan teori integrasi atau teori konsensus karena menganggap masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat anggota-anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu.³⁰

Menurut teori ini, masyarakat merupakan sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu

²⁸ I.B. Irawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 54

²⁹ Wawancara dengan Moh. Zahid, ketua LP2SI pada tanggal 22-Juli-2018

³⁰ I.B. Irawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*., hlm. 51

dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian-bagian yang lain.³¹ Asumsi mendasar dari teori ini adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial berlaku fungsional terhadap yang lain. Jadi ada interaksi yang secara fungsional saling mempengaruhi terhadap keseimbangan suatu sistem sosial sebab semua peristiwa dan semua struktur berlaku fungsional bagi masyarakat.³²

Dalam konteks pelaksanaan Gerbang Salam, kata konsensus terintegrasi dalam segenap lapisan masyarakat, mulai dari jajaran pemerintah, tokoh ulama, dan masyarakat secara umum. Namun dalam implementasinya, konsensus ini mengalami pasang surut, bahkan mengalami pergeseran. Gambaran ini bisa dipahami dari petikan wawancara dengan ketua LP2SI, Moh. Zahid ketika ditanya tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan gerbang salam. Berikut petikannya:

Adalah keterlibatan masyarakat. Mana LP2SI, mana Pemkab. Jadi bertanya pada pihak lain bukan pada diri sendiri. Padahal gerbang salam ini adalah gerakan bersama.³³

Seirama dengan petikan diatas, Umar Bukhari selaku sekretaris LP2SI juga memberikan keterangan berikut:

Belum ada kesadaran bersama bagi kita bahwa gerakan ini menjadi aspirasi semua pihak. Lalu ada yang bermain kepentingan disini. Jadi kelemahan di level kesadaran. Kalau dana itu di nomor sekian.³⁴

Keterangan diatas menggambarkan bahwa konsensus itu surut ketika dihadapkan dengan pelaksanaan Gerbang Salam. Indikasinya adalah partisipasi semua pihak yang rendah dalam menggiatkan pelaksanaan program itu. Sebab ketika berhadapan dengan fakta sosial maka yang ditanyakan adalah mana LP2SI dan mana Pemkab. Padahal secara bersama-sama program gerbang salam ini menjadi kewajiban bersama yang harus dilaksanakan dan dipikul bersama oleh semua pihak. Namun kenyataannya, belum ada kesadaran yang mengarah kesana dan beranggapan bahwa pelaksanaan gerbang salam menjadi kewajiban LP2SI saja. Tanpa dukungan dan kerlibatan semua pihak, LP2SI tidak berarti apa-apa.

Fenomena tersebut otomatis menjadikan struktur sosial yang seharusnya terlibat secara fungsional di dalamnya mengalami disfungsi. Kondisi ini dapat dilacak dan dianalisis dari semua elemen masyarakat yang secara langsung

³¹ George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (terjemahan Alimandan). (Jakarta: Rajawali Pres, 1992.), hlm. 25

³² I.B. Irawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, hlm. 42-43

³³ Wawancara dengan Moh. Zahid, ketua LP2SI pada tanggal 22-Juli-2018

³⁴ Wawancara dengan Umar Bukhari, sekretaris LP2SI pada tanggal 05-Juli-2018

maupun tidak langsung memiliki hubungan fungsional dan mempengaruhi keseimbangan sistem sosial yang ingin dibangun berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Elemen masyarakat yang menjadi struktur sosial dalam hal ini dapat dikelompokkan sebagai berikut, antara lain adalah :

1. Lembaga eksekutif dan legislatif, terutama kepemimpinan daerah (Bupati dan wakil bupati).
2. Kiyai/ulama sebagai elit lokal yang mempunyai pengaruh massa yang banyak
3. MUI, Ormas, takmir masjid dengan remasnya, muballigh, akademisi, dan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan masyarakat di Pamekasan.

Secara kultural, gerakan yang mendukung terhadap pembangunan masyarakat Islami ini sebenarnya sudah ada ditengah-tengah masyarakat Pamekasan. Pengajian-pengajian umum seringkali digelar di masjid-masjid. Ada yang bersifat rutin dan ada yang bersifat temporal. Dari organisasi kemasyarakatan ada NU dan Muhammadiyah yang banyak melakukan pengajian, bahkan sampai ke masyarakat pedesaan dengan bermacam majlis taklimnya. Ada juga pondok-pondok pesantren yang jumlahnya sangat banyak melakukan internalisasi ajaran Islam secara intensif. Belum lagi kampus dan lembaga-lembaga lain yang ikut memberikan suntikan dalam pendidikan agama.

Namun karena sasaran sosialnya sangat luas maka pendekatan kultural ini dirasa kurang mampu dalam memberikan optimalisasi tanpa adanya dukungan dari gerakan struktural (pemerintah). Sehingga jalur pendekatan struktural (pemerintah) memang diharapkan untuk menutupi kelemahan gerakan kultural sehingga mampu memberikan optimalisasi terhadap Gerbang Salam sebagai model dan gerakan dakwah. Hal ini sebagaimana yang dapat dipahami dari petikan wawancara dengan ketua LP2SI, Moh. Zahid berikut ini:

Gerbang Salam itu sesungguhnya diharapkan dapat mengisi kelemahan dari gerakan kultural yang banyak dilakukan oleh ormas Islam. Ketika berkaitan dengan pentingnya masuk kebijakan pemerintah maka gerakan kultural terkadang mandul. Dan itu diharapkan bisa diterobos melalui kewenangan dari pemerintah.³⁵

Jadi posisi pemerintah sebagai elemen yang paling memiliki power terhadap gerak perkembangan dan pembangunan masyarakat diyakini mampu memberikan terobosan secara langsung terhadap gerakan ini. Dalam konteks pemerintah ini, posisi kepemimpinan paling urgen sebagai jantung kekuasaan. Konkritnya adalah posisi Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. Dalam petikan yang lain, Moh. Zahid memberi keterangan sebagai berikut:

³⁵ Wawancara dengan ketua LP2SI pada tanggal 22-Juli-2018

Gerbang salam itu bisa berjalan sesungguhnya jika ada political will (dukungan politik) dari pemerintah dalam hal ini Bupati dan jajarannya termasuk juga instansi terkait. Jadi ada turun naik. Jika Bupati nya konsen meminta pandangan dari berbagai pihak termasuk LP2SI maka gerbang salam itu kondusif pelaksanaannya.³⁶

Sejalan dengan pernyataan di atas, Supandi selaku akademisi juga memberikan keterangan yang serupa sebagai berikut:

Pembentukannya tahun 2002 yang divakili oleh KH. Khalirurrahman ketika menjadi Nu dan pada saat Dwiyatmo menjadi Bupati Pamekasan. Kemudian terjadi beberapa pergantian kepemimpinan daerah setelah itu. Tapi yang paling maksimal itu dilakukan pada masanya Bupati sekian (nama disamarkan) kemarin. Dibentuk kegiatan-kegiatan yang mengarah kesana, tapi tidak dalam rangka mengejar target Gerbang Salam. Saya tidak melihat begitu. Tapi karena mungkin ada tekanan-tekanan atau permohonan dari ulama maka gerbang menjadi landasan dasar.³⁷

Pernyataan-pernyataan tersebut menggambarkan adanya pengaruh dan urgensi kepemimpinan daerah dalam memberikan dukungan politik terhadap pelaksanaan Gerbang Salam secara optimal. Pengaruh tersebut begitu dirasakan dalam setiap pergantian kepemimpinan. Bahkan dalam satu pemimpin yang sama dalam periode yang berbeda atau dalam periode yang sama bisa berbeda dalam memberikan respon dan kebijakan. Moh. Zahid juga menyampaikan adanya kendala dari faktor kepemimpinan ini dari sisi perilaku, yaitu misalnya pemimpin melakukan sesuatu yang dapat membuat orang lain ragu untuk melakukannya.³⁸

Oleh karena itu, pendekatan struktural ini sangat tergantung pada komitmen seorang pemimpin (Bupati). Jika komitmen seorang pemimpin kuat dalam memberikan dorongan politik melalui kebijakan dan wewenang yang dimilikinya maka akan lebih mudah dalam mengorganisir struktur politik dan pemerintahan yang ada di bawahnya. Contoh misalnya ada kebijakan untuk melibatkan unsur LP2SI dalam setiap rencana pembangunan di semua dinas atau instansi pemerintah yang lain. Maka adanya bentuk dukungan seperti itu akan sangat efektif dan kondusif dalam upaya optimalisasi Gerbang Salam. Pengalaman sebelumnya sudah membuktikan bahwa ada himbuan dari pemerintah kepada semua individu yang ada di lingkungan pendidikan dan

³⁶ Wawancara dengan ketua LP2SI pada tanggal 22-Juli-2018

³⁷ Wawancara dengan Supandi, Akademisi dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 07-07-2018

³⁸ Wawancara dengan Moh. Zahid, ketua LP2SI pada tanggal 22-Juli-2018

pemerintahan untuk menutup aurat. Himbauan ini pun ditaati dan berjalan secara efektif dan kondusif. Jadi ada atau tidaknya komitmen seorang pemimpin akan mempengaruhi keseimbangan sistem sosial. Karena faktor kepemimpinan berlaku fungsional bagi segenap elemen-elemen masyarakat lainnya.

Jika dianalisis adanya komitmen pemimpin ini seringkali tergantung pada adanya dukungan dari kaum ulama atau elit lokal, terutama yang memiliki kekuatan massa yang banyak. Analisis teori fungsional menampakkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi secara fungsional antara eksistensi kaum elit lokal sebagai pemegang kendali kekuatan massa yang banyak terhadap perilaku dan komitmen kepemimpinan daerah. Berdasarkan kondisi sosial yang melatar belakangi munculnya Gerbang Salam ini dapat dilihat ada kekuatan ulama yang berpengaruh terhadap kebijakan politik lokal di Pamekasan. Kekuatan ulama ini secara konsisten memperjuangkan nilai-nilai keislaman melalui kebijakan politik lokal. Hasilnya adalah munculnya Perda Nomor 18 tanggal 32 November Tahun 2001 tentang larangan atas minuman beralkohol yang kemudian berlanjut pada deklarasi Gerbang Salam pada tahun berikutnya.

Kekuatan politik kiyai sebagai elit lokal mempunyai arti penting bagi seorang pemimpin dalam mempertahankan kedudukan dan kekuasaannya. Sebab hal ini erat kaitannya dengan dukungan politik para kiyai dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. Dukungan para kiyai atau ulama ini seperti perempuan yang sangat seksi yang menjadi rebutan para kontestan Pilkada. Maka dalam hal ini, gerbang salam dianggap tidak lebih hanya sekedar alat politik untuk meraih kekuasaan semata. Sehingga namanya alat maka sifatnya temporal karena tujuan sebenarnya adalah kekuasaan. Sebagaimana ungkapan Umar Bukhari bahwa ada yang bermain kepentingan disini.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka muncul pandangan pro dan kontra terhadap keberadaan Gerbang Salam. Ada yang kontra dari beberapa kalangan masyarakat secara subjektivitas menganggap keberadaan gerbang salam di tengah masyarakat Pamekasan itu hanya sekedar slogan dan alat politik. Hal ini seperti yang disampaikan Supandi dalam petikan wawancara berikut:

“Contoh banyak sekali para tokoh dan masyarakat itu yang masih menganggap gerbang salam itu adalah alat politik. Anggapan mereka begitu sehingga bagaimana fungsinya alat politik, ia hanya sebagai icon membaguskan namanya. Anggapan disatu sisi ya begitu. Tapi di sisi yang lain bagi yang pro adalah gerakan moral. Pendapat yang kontra ini adalah subjektifitas, artinya adalah pendapat pribadi. Dan yang berpendapat itu bukan hanya orang biasa tapi praktisi pendidikan juga. Contoh ketika wacana gerbang salam akan dibumihngkan di kabupaten pamekasan misalnya

*banyak yang bilang itu bukan gerbang salam, tapi “salam pagerbang”. Artinya hanya rame di mulut saja. Itu juga kendalanya begini. Kenapa itu timbul wacana bahwa itu bukan wacana gerbang salam murni untuk optimalisasi masyarakat menjadi masyarakat islami yang sebenarnya. Contoh kan pemerintah hanya mengambil nama tapi kemudian mereka tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya”.*³⁹

Keberadaan kiyai sebagai elit lokal yang memiliki pengaruh yang cukup kuat di masyarakat kemudian dianggap memudar pasca pilkada Pamekasan 9 Januari 2013 yang lalu.⁴⁰ Kemenangan pasangan ASRI (Ahmad Syafi'i-Khalil Asy'ari) atas KOMPAK (Khalilurrahman-Moh.Masduki) menjadi sorotan berbagai pihak. Sebab adagium kiyai sebagai sosok panutan dan diikuti menjadi terbantahkan. Pasangan ASRI yang merupakan masyarakat biasa tanpa identitas kiyai berhasil memenangkan suara atas pasangan KOMPAK yang berasal dari trah kiyai. Meski sebenarnya kekalahan calon yang berasal dari trah kiyai ini bisa disebabkan berbagai faktor, misalnya kesadaran dan paradigma politik masyarakat yang berubah dan atau bersamaan dengan kekuatan kiyai yang sudah mengalami disintegrasi, namun situasi pergeseran ini tetap menjadi semacam momentum pudarnya karisma kiyai di kalangan masyarakat, khususnya Pamekasan.⁴¹

Keadaan ini juga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pudarnya komitmen pemerintah dalam hal ini pimpinan daerah (Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan). Keberadaan pemerintah dalam memberikan dukungan politik terhadap pelaksanaan Gerbang Salam menjadi berkurang. Sehingga pendekatan struktural yang diharapkan dapat menutupi kelemahan pendekatan kultural yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam tidak dapat dilakukan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa ketersediaan dana yang tidak mencukupi dalam menggiatkan pelaksanaan Gerbang Salam menjadi kendala yang disepakati oleh semua pihak. Bahkan dalam 3 tahun terakhir (2016-2018) ini bantuan dana kepada LP2SI selaku lokomotif Gerbang Salam tidak dari Pemerintah daerah selaku pihak yang memberikan SK. Tidak adanya ketersediaan dana ini disebabkan adanya peraturan yang sangat ketat dari pemerintah pusat tentang dana hibah bantuan sosial, yaitu Permendagri no 32

³⁹ Wawancara dengan Supandi, Akademisi dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 07-07-2018

⁴⁰ Zainuddin Syarif, “Pergeseran Perilaku Politik Kiyai dan Santri”, hlm. 303

⁴¹ Ibid., hlm. 303

tahun 2011 dan UUD no 23 tahun 2014. Berikut penuturan pemerintah tentang hal ini:

“Sementara ini bicara dana dengan adanya undang-undang hibah dan bansos ini belum. Jadi untuk mendapatkan hibah bansos itu sebuah organisasi harus berbadan hukum Indonesia. Setelah berbadan hukum Indonesia mereka harus menunggu tiga tahun baru boleh mendapatkan hibah bansos dan itu tidak boleh tiap tahun”.⁴²

Menurut Umar Bukhori, keberadaan LP2SI untuk mendapat ruang dan fasilitas yang layak dari pemerintah menjadi semakin rumit. Sebab di samping ketersediaan dana yang sangat minim, masih ditambah lagi dengan peraturan yang ketat dari pemerintah pusat yang pada akhirnya mengharuskan LP2SI beralih status menjadi yayasan demi mendapatkan status badan hukum Indonesia untuk memperoleh danah hibah. Dan itu pun tidak bisa mendapatkannya setiap tahun. Padahal kepengurusan LP2SI ini dibentuk melalui SK Bupati Pamekasan.

Terkait dengan hal dana tersebut, ketua LP2SI memberingan pandangannya melalui petikan wawancara berikut:

“Anggaran itu bagi kami bukan sesuatu yang sangat penting, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana ada kebijakan untuk mau meminta, mendengarkan, dan memformulasikan satu pola pembangunan yang itu didasarkan pada Gerbang Salam. Dan itu pasang surut”.⁴³

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas bahwa bola sebenarnya ada di tangan pemerintah. Dalam hal ini adalah Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan dituntut serius memberikan dukungan politik melalui wewenang dan kebijakannya terhadap pelaksanaan Gerbang Salam. Dukungan itu bisa berwujud pemberian anggaran dana yang secukupnya untuk pelaksanaan Gerbang Salam. Sebab pelaksanaan Gerbang Salam dengan sejumlah agendanya yang sangat banyak untuk merubah karakter masyarakat Pamekasan menuju cita-cita Pamekasan Islami dengan waktu yang lama tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Selain itu, pemerintah perlu melibatkan LP2SI dalam setiap merumuskan pola pembangunan dalam semua aspeknya.

Analisis Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Gerbang Salam

Dalam pandangan teori fungsionalisme struktural, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri atas banyak lembaga. Masing-masing

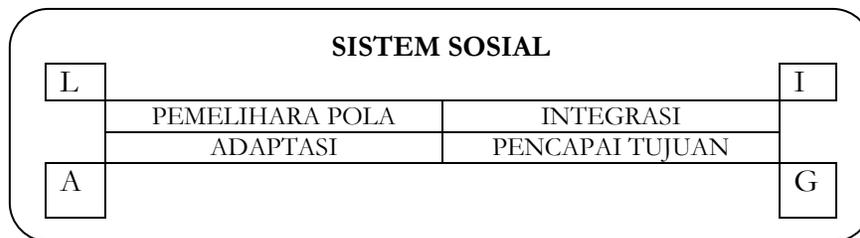
⁴² Wawancara dengan Bpk. Alwi, Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan pada tanggal 17 07 2018

⁴³ Wawancara dengan Moh. Zahid, ketua LP2SI pada tanggal 22-Juli-2018

lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri yang saling berhubungan untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan.⁴⁴ Maka berdasarkan teori itu, terdapat lembaga-lembaga dalam suatu sistem sosial yang ingin dibangun berdasarkan model dan gerakan dakwah Gerbang Salam ini. Lembaga-lembaga itu adalah LP2SI, elit lokal (kaum ulama yang punya pengaruh kekuatan massa), pemerintah, dan lembaga-lembaga pendidikan dan sosial.

Semua lembaga tersebut berlaku secara fungsional bagi yang lainnya. Dalam pandangan teori sibernetika Talcot Person (1902-1979), kehidupan masyarakat itu merupakan suatu sistem sosial yang saling berhubungan. Sehingga berdasarkan adanya hubungan-hubungan yang saling mempengaruhi itu, sistem sosial harus dilihat secara integral. Hubungan-hubungan itu terdiri dari bermacam bentuk yang berlaku secara fungsional. Dalam analisis teorinya, Talcot Person membagi pola fungsional kedalam empat macam bentuk, yaitu AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency). Hal ini sebagaimana yang terlihat dalam gambar berikut :

Gambar Analisis Teori AGIL Terhadap Sistem Sosial



Adaptasi melaksanakan fungsi adaptasi ialah menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal. Fungsi Goal Attainment, melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. Integrasi melakukan fungsi mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sedangkan latency melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. Keempat pola tersebut dijadikan pisau analisis dalam melihat suatu sistem sosial. Maka berdasarkan hal ini, bangunan sistem sosial yang sedang disesuaikan dengan gerbang salam di Pamekasan dapat dilihat sebagaimana berikut:

Analisis Sistem Sosial Gerbang Salam Menurut Teori AGIL Talcot Persons

⁴⁴ I.B. Irawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, hlm. 46

L			I
	LP2SI	KOMITMEN/NILAI AGAMA	
	ELIT LOKAL	PEMERINTAH	
A			G

Para kiyai dan ulama yang berfungsi sebagai elit masyarakat karena dapat menjadi panutan dan mempengaruhi kehidupan mereka memendam kekuatan politik yang dapat mempengaruhi kebijakan politik lokal. Pemerintah dengan kewenangan dan kebijakan yang dimilikinya memiliki kekuatan besar yang dapat mengendalikan perubahan masyarakat dan melakukan pencapaian tujuan. Sementara itu, LP2SI sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dapat menyiapkan pelaksana dan merumuskan konsep yang dapat memotivasi mereka untuk bertindak. Sedangkan apa yang menjadi faktor integrasi antara semuanya adalah komitmen menuju cita-cita Pamekasan yang Islami, yaitu suatu pembangunan tata ruang yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran agama Islam. Dengan menggunakan pendekatan teori fungsional maka tampak adanya keterkaitan antara bagian-bagian dalam suatu sistem tersebut. Apabila saling keterkaitan itu diabaikan maka mekanisme sistem akan terganggu.⁴⁵

Apa yang membuat suatu bagian itu mampu untuk mengaitkan dirinya dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan disebut konsensus. Dalam teori ini, konsensus ini bermakna kesepakatan bersama antara bagian-bagian yang ada dalam keseluruhan masyarakat. Kesepakatan bersama ini dalam penjelasan Persons merupakan syarat fungsional.⁴⁶ Jika tak ada konsensus antar bagian-bagian maka tak ada yang namanya keterkaitan fungsional dan keseimbangan sistem pun menjadi terganggu.

Apa yang menjadi konsensus dalam sistem pelaksanaan Gerbang Salam adalah komitmen bersama antar bagian-bagian terkait sebagai syarat mutlak optimalisasi. Jika tidak demikian maka upaya optimalisasi menjadi sulit dilakukan. Hal ini juga sebagaimana yang diakui oleh Moh. Zahid dalam ringkasan wawancara berikut:

*Mungkin diawali dengan duduk bersama lagi. Jadi Gerbang Salam ini mau dilanjutkan lagi apa tidak. Jadi kembali membangun komitmen. Kalau komitmen ada maka yang lain akan jalan.*⁴⁷

Pernyataan tersebut bermakna mempertanyakan kembali akan komitmen semua pihak dalam menggiatkan dan melaksanakan program gerbang salam.

⁴⁵ Sutaryo, *Dinamika Masyarakat dalam Perspektif Konflik* (Yogyakarta: Fisifol-Universitas Gajah Mada), hlm. 9

⁴⁶ I.B. Irawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, hlm. 45

⁴⁷ Wawancara dengan Moh. Zahid, ketua LP2SI pada tanggal 22-Juli-2018

Mana komitmen ulama, mana keseriusan pemerintah, dan mana komitmen semua pihak. Sebab LP2SI tanpa komitmen mereka bersama tak akan berdaya dalam menggiatkan gerbang salam secara optimal.

Dalam teori fungsional, tingkat integrasi dalam suatu sistem sosial dapat diukur dan dilihat dengan sejauh mana komitmen yang dibangun. Semakin tinggi tingkat komitmen seseorang terhadap suatu sistem tertentu maka semakin tinggi tingkat integrasi yang dapat dicapainya. Sebab komitmen ini berhubungan sekali dengan tindakan yang konsekuen yang muncul dari dalam hati tanpa adanya paksaan.⁴⁸

Selain punya fungsi integrasi, komitmen juga berfungsi sebagai adaptasi. Sebab dalam penjelasan teori fungsional, bagian-bagian dari suatu sistem dapat berfungsi satu arah, timbal balik, dan atau berfungsi ganda.⁴⁹ Komitmen dapat memberi penyesuaian yang berefek pada tingkat perilaku dan kuatnya dorongan-dorongan untuk melakukan tindakan.

Masalah komitmen ini, baik sebagai fungsi adaptasi maupun integrasi juga diperkuat oleh informan yang lain. Dalam sebuah wawancara, Supandi menjelaskan sebagaimana petikan berikut:

Harus dimulai dari komitmen pemimpin. Kalau pemimpinnya mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh terkait dengan gerbang salam maka kebawahnya tinggal jalan. Artinya sungguh-sungguh itu pemerintah dalam melaksanakan gerbang salam itu tidak setengah-setengah. Tidak dijadikan alat politik, tapi memang benar-benar ingin menanamkan karakter nilai-nilai keislaman tertanam ini di kabupaten pamekasan. Contoh ketika pemerintah mau benar-benar maka anggarannya harus diseriuskan. Kemudian timenya juga harus benar-benar, bukan sebagai pelengkap elemen. Kemudian penerapannya harus sungguh-sungguh. Kalau pemerintah tidak sungguh-sungguh dan hanya dijadikan sebagai alat politik dan kepentingan semata-mata maka ya berjalan begitu saja. Sebagai pelengkap saja, sebagai pemanis.⁵⁰

Dengan demikian dua informan, baik dari internal maupun eksternal LP2SI sama-sama sepakat dalam hal komitmen sebagai titik sentral dalam upaya optimalisasi gerbang salam. Yang pertama lebih umum pada upaya komitmen bersama semua pihak, sedangkan yang kedua lebih menekankan pada komitmen pemerintah sebagai titik awal upaya optimalisasi. Maka disini keseriusan pemerintah lebih dipertanyakan, terutama dalam soal pendanaan dan membangun team pelaksana yang optimal. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten

⁴⁸ I.B. Irawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, hlm. 46

⁴⁹ Ibid, hlm. 43

⁵⁰ Wawancara dengan Supandi, Akademisi dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 07-07-2018

pamekasan yang diwakili oleh sekretaris daerahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Kedepan ini kita harus banyak berdiskusi dengan LP2SI. Tinggal bagaimana kita memberikan mereka fasilitas, terutama dalam pendanaan dan sebagainya.*⁵¹

Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa harus ada komitmen yang serius dari pemerintah sendiri di masa yang akan datang untuk menggiatkan dan melaksanakan Gerbang Salam dalam kapasitasnya yang berfungsi melakukan pencapaian tujuan, yaitu pamekasan yang islam. Dari eksekutif dapat memberikan fasilitas dan menjadikan LP2SI sebagai mitra komunikasi dalam mencapai tujuan tersebut. Sedangkan lembaga legislatif dapat menopangnya dalam bentuk Perda-perda yang bernuansa Islami untuk menguatkan keberlangsungan sistem.

Untuk menjaga kelangsungan hidup suatu sistem sosial, teori fungsional memberikan alternatif bahwa setiap masyarakat perlu melaksanakan sosialisasi sistem sosial yang dimiliki⁵². Dalam konteks ini adalah Gerbang Salam bagi masyarakat Pamekasan. Caranya adalah dengan mekanisme sosialisasi dan mekanisme kontrol sosial. Menurut Persons, mekanisme sosialisasi merupakan alat untuk menanamkan pola kultural seperti nilai-nilai, bahasa, dan lain-lain. Hal demikian dapat dilaksanakan oleh LP2SI yang berfungsi sebagai latency bersama semua ormas-ormas Islam dan organisasi sosial dan pendidikan. Dengan proses ini masyarakat akan menerima dan memiliki komitmen terhadap norma-norma yang ada. Sedangkan mekanisme kontrol dapat menekan ketegangan-ketegangan, yang antara lain dapat dilakukan dengan pelembagaan, sanksi-sanksi, aktivitas ritual, reintegrasi untuk mencapai keseimbangan, penyelamatan pada keadaan yang tidak normal, dan pelembagaan kekuasaan untuk melaksanakan tatanan sosial.⁵³

Sebagai upaya kontrol di masa yang akan datang untuk menjaga komitmen pemerintah dan masyarakat maka Gerbang Salam perlu dilembagakan dalam bentuk Perda. Sehingga dengan Perda Gerbang Salam tersebut, maka pemerintah bersama masyarakat harus senantiasa melibatkan konsep Gerbang Salam dalam setiap pola pembangunan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, khususnya Pamekasan.

⁵¹ Wawancara dengan Bpk. Alwi, Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan pada tanggal 17 07 2018

⁵² I.B. Irawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, hlm. 46-47

⁵³ Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. (Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan tenaga Kependidikan, 1988), hlm. 29

Penutup

Gerbang salam merupakan konsepsi model dan strategi dakwah untuk mewujudkan Pamekasan Islami. Gerakan ini lahir di tengah kondisi sosial Pamekasan yang memiliki potensi keagamaan yang cukup banyak, tapi disisi yang lain masih ada situasi dan kondisi yang kontras dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, seperti peredaran minuman beralkohol, persoalan asusila, dan sebagainya. Momentum reformasi dan terbukanya otonomi daerah mempermudah jalan bagi perjuangan para elit lokal dari lapisan masyarakat Islam untuk memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam sistem sosial dengan cara mempengaruhi kebijakan politik daerah. Hasilnya muncul sejumlah perda, kebijakan, dan himbauan dari pemerintah yang mendorong terwujudnya sistem sosial yang Islami. Namun sistem sosial yang ingin dibentuk belum mencapai harapan.

Analisis fungsionalisme struktural memperlihatkan adanya bagian-bagian dalam sistem sosial yang mengalami disfungsi. Sehingga bagian-bagian struktur sosial yang semestinya berlaku secara fungsional mengalami pergeseran yang mengganggu terhadap keseimbangan sistem. Kata konsensus pun makin pudar ketika dihadapkan dengan upaya kontrol. Maka Gerbang Salam mengambang diantara slogan dan fakta realisasinya di lapangan. Hal tersebut dikarenakan beberapa kendala:

1. Kurangnya komitmen semua pihak, terutama dari pemerintah dalam hal ini adalah kepemimpinan daerah untuk benar-benar serius menggerakkan Gerbang Salam.
2. Dana yang diberikan relatif kecil untuk sebuah gerakan yang besar. Padahal gerakan ini memiliki skala yang besar terkait dengan gerakan merubah mental yang membutuhkan waktu yang lama.
3. Persepsi yang keliru dan kurangnya kesadaran semua pihak akan gerakan ini.
4. Melemahnya pengaruh elit lokal karena disintegrasi politik sehingga intensitas ulama mengawal gerakan ini menjadi surut.

Adanya kendala-kendala tersebut menyebabkan gerakan ini kurang optimal. Pendekatan teori fungsional memperlihatkan pola hubungan fungsional yang harus diaktifkan untuk menciptakan keseimbangan sistem ini, yaitu elit lokal berfungsi sebagai adaptasi, pemerintah berfungsi sebagai pencapai tujuan, komitmen berfungsi sebagai integrasi, dan LP2SI berfungsi sebagai pemelihara pola. Untuk ketahanan sistem ini diperlukan mekanisme sosialisasi dan mekanisme kontrol.

Untuk optimalitas gerakan ini maka ada beberapa hal yang disarankan :

Ibnu Ali
Ali Tohir

1. Komitmen semua pihak, terutama pemerintah yang memiliki power dalam mengendalikan masyarakat. Pemerintah yang dalam hal ini diawali dari Bupati dituntut serius dalam menggerakkan gerbang salam, baik dengan memberikan dana yang secukupnya, dukungan politik, dukungan partisipasi, dan lain sebagainya.
2. Sebagai mekanisme kontrol untuk menjaga intensitas gerakan ini di setiap periode kepemimpinan daerah maka perlu melembagakan Gerbang Salam ini dalam bentuk Perda yang mengharuskan Gerbang Salam diikuti dalam setiap pola pembangunan Kabupaten Pamekasan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, editor : Kacung Marijan dan Ma'mun Murod al-Brebesy. Jakarta : Grafindo, 1999
- Abdul Chalik, *Islam dan Kekuasaan*. Yogyakarta : Interpena, 2002
- Abdul Chalik, *Pertarungan Elit dalam Politik Lokal*. Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2017
- Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berpradigma Ganda* (terjemahan Alimandan). Jakarta : Rajawali Pres, 1992
- Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif", Makara, jurnal ilmu sosial humaniora Vol. 9, No.2 Desember 2005. Jakarta, UI
- Holifatur Rafi'ah. *Sejarah Gerbang Salam Di Kabupaten Pamekasan Madura*. Skripsi : Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015
- I.B.Irawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta : Kencana, 2012
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma, 2014
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 1994
- Moh. Toriquddin, *Relasi Agama dan Negara dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer*. Malang : UIN-Malang Press, 2009
- Ramdani Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung : Pustaka Setia, 2007
- Robert K. Merton, *Sosial Theory And Sosial Structure*. Free Press, 1969
- Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* Bogor: Ghalia Indonesia, 2006
- Sutaryo, *Dinamika Masyarakat dalam Perspektif Konflik*. Yogyakarta : Fisifol-Universitas gajah Mada, tt

- Supandi, *Model Pengembangan Masyarakat melalui Penguatan Pendidikan Islam (Studi Kebijakan Pemerintah tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Islam di Pamekasan)*. Surabaya : Disertasi Pasca Sarjana Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, 2017
- Tim LP2SI, *Mengenal Gerbang Salam*. Pamekasan: LP2SI, 2010
- Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Jakarta : Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan tenaga Kependidikan, 1988
- Zainuddin Syarif, “*Pergeseran Perilaku Politik Kiyai dan Santri*”, *Al-Tahrir*, Jurnal Pemikiran Islam vol 16 no 2 November 2016. Ponorogo, IAIN
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pamekasan